

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ilmu hubungan internasional tidak hanya mencangkup unsur politik atau keamanan saja, akan tetapi mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, hankam dan sebagainya, misalnya imigrasi dan emigrasi, pariwisata, olahraga atau pertukaran budaya (*cultural exchange*). Dinamika hubungan internasional saat ini mengemukakan isu-isu secara lebih kompleks yang mengubah tatanan internasional. Kerangka perubahan yang terjadi dalam hubungan internasional muncul sebagai sebuah tuntutan kepada para penstudi hubungan internasional untuk bisa menggambarkan, menerangkan dan memprediksi berbagai fenomena internasional secara lebih komprehensif. Sejalan dengan perubahan-perubahan diatas meliputi lima bagian utama, yaitu aktor, tujuann aktor, power, interaksi dan sistem internasional (Rochester, 2002).

Perubahan aktor diindikasikan dengan berubah ataupun bertambahnya aktor internasional, salah satu bentuk penambahan aktor seperti terbentuknya *Multinational Corporations* (MNCs), *International Governmental Organizations* (IGOs), *International non Governmental Organizations* (INGOs) dan kelompok-kelompok individu lintas negara. Interaksi yang dihasilkan oleh IGOs dan NGOs semakin rumit disebabkan keterkaitan mereka dengan berbagai macam isu mulai dari perdagangan internasional, pertahanan, perdamaian dunia, pembangunan sosial budaya, kesehatan, imigrasi, lingkungan hidup dan pariwisata.

Seiring dengan perubahan yang terjadi, maka tugas utama yang dilakukan oleh negara adalah mengkolaborasikan upaya di tingkat nasional dengan peningkatan kerjasama internasional melalui kerjasama dengan berbagai negara. Kerjasama yang dilakukan dapat berupa berbagai aspek dilakukan sesuai dengan kebijakan politik luar negeri mengenai kewajiban lembaga atau instansi pemerintah dengan melakukan konsultasi dan koordinasi hubungan eksternal sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Setiap negara diharapkan dapat bekerjasama dalam meningkatkan kepentingan negaranya. Interaksi antarnegara tersebut yang pada akhirnya menghasilkan sebuah kerjasama bilateral maupun multilateral. Pemerintah menyadari bahwa kerjasama tidak hanya bertumpu pada aktor negara saja, melainkan aktor-aktor internasional yang lain semacam aktor subnasional (pemerintah wilayah).

Pemerintah wilayah hadir dalam ranah internasional untuk memenuhi otonomi daerahnya melalui kerjasama luar negeri, dengan begitu maka membuka gerbang bagi dunia luar kepada *local government to local government* untuk mengembangkan potensi yang dimiliki kota atau daerah tersebut. Dalam kaitannya diplomasi sebagai bentuk dari implementasi politik luar negeri tidak dapat menghindari perubahan yang terjadi di tatanan global. Dengan terjadinya perkembangan teknologi dan komunikasi telah menjadikan diplomasi semakin lebih intens dan juga lebih efektif. Globalisasi telah mengubah cara aktor nasional dan internasional dalam melakukan komunikasi, negoisasi dan interaksi. Fenomena globalisasi juga telah memunculkan banyak pergeseran yang terjalin dalam tatanan sosial masyarakat, terutama dalam komunikasi serta penyebaran informasi pada masa kini. Masyarakat saat ini lebih sering memakai

internet dan media sosial dalam mengakses data terbaru ataupun dalam menyebarkan informasi melalui smartphone mereka. Selain itu aktor subnasional yang merujuk pada pemerintah daerah ini merupakan suatu bentuk penerapan paradiplomasi yang sudah banyak diterapkan di Indonesia.

Aktivitas yang dilakukan pemerintah kota atau daerah dapat dikatakan sebagai suatu paradiplomasi, yang mana diplomasi tersebut dilakukan oleh entitas subnasional atau sub-state dengan melakukan diplomasi dengan mitra luar negeri. Untuk itu negara bukan lagi menjadi aktor tunggal, melainkan aktor subnasional juga turut serta dalam melakukan aktivitas hubungan internasional demi memenuhi kebutuhan kota ataupun daerahnya. Selain sebagai wujud otonomi, yang dilakukan oleh aktor subnasional merupakan suatu cara yang lebih efektif dalam menyelesaikan berbagai kepentingan nasional. Bagaimanapun juga aktor subnasional lebih mengetahui mengenai kebutuhan dan potensi yang dimiliki daerahnya dibandingkan pemerintah pusat.

Untuk itu peran aktif pemerintah daerah sebagai aktor subnasional yang diterapkan dalam kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 21 yang telah diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Adanya kebijakan otonomi daerah tersebut memperkuat wewenang aktor subnasional atau pemerintah daerah dalam melakukan perkembangan kotanya melalui hubungan luar negeri secara mandiri dengan mitra asing. Dengan adanya kewenangan tersebut, pemerintah kota telah diberikan wewenang untuk memperluas akses kerjasama dengan lembaga ataupun pemerintah kota di negara lain.

Salah satu kerjasama yang sering dilakukan oleh aktor subnasional *government* ialah *Sister City* (Pujayanti, 2018).

Kerjasama *Sister City* memiliki bentuk kerjasama yang dilakukan dalam berbagai bidang seperti kerjasama budaya, akademik, pariwisata, pertukaran data serta ekonomi. Kerjasama *Sister City* ialah kerjasama yang dilakukan pemerintah Kota di satu negara dengan negara yang lain, dengan berupaya untuk saling menjalankan persahabatan serta untuk saling memajukan kotanya. Umumnya kerjasama yang dilakukan oleh dua kota dengan berbeda negara ini dicoba dengan memandang kesamaan ciri kedua kota yang bersangkutan. Dengan terdapatnya kerjasama *sister city* ini merupakan bentuk usaha dalam meningkatkan potensi serta keunggulan masing-masing kota (Fallis 2013).

Penerapan kerjasama *sister city* di Indonesia bermula pada hubungan baik yang dijalin antara kota Bandung dengan kota Braunschweig di Jerman, merupakan kerjasama *sister city* yang sangat tertua di Indonesia pada tahun 1960. Berawal dari terjalinnya hubungan baik yang kemudian dilanjutkan dalam kerjasama *sister city* kedua kota. Salah satu alasan Kota Bandung menjalankan kerjasama *sister city* dengan berbagai kota di negara lain merupakan usaha dalam melaksanakan pertumbuhan dalam berbagai bidang. Modal awal kerjasama *sister city* ialah dimana kedua negara memiliki pangkal budaya yang sama, menyelenggarakan festival- festival yang mempunyai tema sentral yang mirip, maupun karena pertemuan intensitas kedua negara yang sangat besar. Idealnya *sister city* antar kedua kota tersebut akan mudah

tercapai apabila keduanya memiliki kesamaan dalam aspek budaya, populasi dan memiliki arah pembangunan wilayah yang sama (Sinaga 2010).

Sejak terpilihnya Ridwan Kamil sebagai Walikota Bandung, ia sering mengekspos potensi-potensi kota Bandung melalui unggahan yang di akses melalui akun pribadi media sosialnya, dan pada masa kepemimpinannya dengan segala visi misinya dalam mengembangkan kota Bandung untuk menarik investasi dan mengoptimalkan keuntungan bagi kota Bandung. Maka terjalinlah kerjasama *sister city* dengan kota metropolitan Korea Selatan yaitu Seoul. Pemerintah kota Bandung melakukan kerjasama dengan kota metropolitan Seoul dalam berbagai bidang. seperti kita ketahui bahwa Korea Selatan sangat berhasil dalam berbagai aspek, seperti pariwisata, *egovernance* (tata kelola pemerintahan), tata kelola kota, transportasi, budaya dan pariwisata. Kerjasama *sister city* menjadi menarik karena mengingat kota Seoul sebagai ibu kota metropolitan Korea Selatan. Mengingat hal tersebut, Kota Seoul berpotensi dalam membantu meningkatkan kota Bandung sesuai dengan visi dan misinya, khususnya pada aspek pariwisata dan budaya. Sehingga melalui kerjasama *sister city* kota Bandung-Seoul ini, kota Bandung dapat mencontoh serta menerapkan keberhasilan yang dilakukan oleh kota Seoul dalam bidang pariwisata dan budaya untuk diaplikasikan di kota Bandung. Dalam bentuk melakukan hubungan kerjasama yang baik maka perlu dilakukan koordinasi internal antara kedua belah pihak dan meningkatkan saling pengertian antara keduanya.

Kota Bandung sebagai ibu kota Jawa Barat, merupakan salah satu kota yang di dalamnya memiliki banyak keunggulan dalam perkembangan infrastruktur, budaya,

pariwisata, dan sosial-ekonomi. Selain itu kota Bandung juga terkenal sebagai kota kreatif dan juga kota pariwisata yang sering menjadi tujuan para wisatawan lokal maupun mancanegara karena terdapat berbagai tempat wisata yang unik, indah dan beraneka ragam. Visi kota Bandung dalam aspek Pariwisata dan Budaya saat ini adalah “Mewujudkan Kota Bandung Sebagai Kota Seni Budaya Dan Tujuan Wisata Internasional” sesuai dengan visi tersebut kota Bandung melalui upaya-upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah dalam meningkatkan akselerasi pembangunan guna tercapainya kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, dalam mewujudkan mimpinya kota Bandung memiliki misi, salah satu visinya adalah “Meningkatkan Destinasi Pariwisata Kota Yang Berdaya Saing Tinggi Pada Tingkat Regional, Nasional Maupun Internasional”. Sementara itu, dalam mewujudkan perkembangan kota Bandung dalam aspek budaya dan pariwisata memiliki misi, yaitu :

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Dan Kelembagaan Kepariwisataan Yang Profesional, Berkarakteristik Sunda Dan Berwawasan Global.
2. Meningkatkan Perlindungan, Pengembangan Dan Pemanfaatan Kebudayaan Dan Kesenian.
3. Mengembangkan Industri Pariwisata Yang Kreatif, Inovatif Dengan Memperhatikan Terlaksananya Sapta Pesona.
4. Meningkatkan Destinasi Pariwisata Kota Yang Berdaya Saing Tinggi Pada Tingkat Regional, Nasional Maupun Internasional.

5. Meningkatkan Pemasaran Melalui Kemitraan Dan Kerjasama Budaya Dan Pariwisata Dengan Pemangku Kepentingan Dan/Atau Kab/Kota/Negara Lain.

Bersumber pada visi dan misi tersebut, kota Bandung memiliki rencana strategis yaitu meningkatkan kebudayaan dan mengembangkan industri pariwisata ditingkat nasional maupun internasional. Hal ini dikarenakan untuk meningkatkan pariwisata berbasis budaya di Kota Bandung salah melalui mitra asing yaitu *Sister City*. Kerjasama *Sister City* Bandung-Seoul menjadi menarik karena Seoul berpotensi untuk membantu Bandung dalam mewujudkan visi misinya dalam bidang pariwisata dan budaya, karena Seoul sudah mengalami banyak kemajuan dalam budaya dan pariwisatanya di dunia internasional. Melalui kerjasama *Sister City* ini Kota Bandung berupaya meningkatkan kerjasama budaya dan pariwisata dengan melibatkan kerjasama dengan kemitraan di kota lain. Inilah yang menjadi alasan mengapa penulis membahas kerjasama Bandung-Seoul yang berjudul “Kerjasama *Sister City* Bandung-Seoul dalam Menunjang Perkembangan Budaya dan Pariwisata di Kota Bandung”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu adanya identifikasi masalah yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang tersusun dan akan analisa jawabanya sehingga dapat fokus pada masalah yang akan diteliti. Identifikasi masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kerjasama *Sister City* Bandung-Seoul ?
2. Bagaimana Perkembangan Pariwisata dan Budaya di Kota Bandung ?
3. Bagaimana Program Kerjasama *Sister City* Bandung-Seoul dalam Bidang Pariwisata dan Budaya ?

1.3 Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya kerjasama *Sister City* Bandung-Seoul serta untuk memudahkan penulis dalam penyusunan Skripsi ini, maka perlu dibatasi permasalahan yang terbatas pada Program kerjasama *Sister City* antara Kota Bandung dengan Kota Seoul dalam bidang pariwisata dan perkembangan budaya dari tahun 2016 – 2019.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut **“Bagaimana Implementasi program *Sister City* Bandung-Seoul yang**

meliputi Little Bandung, Little Seoul dan *Seoul Friendship Festival* dapat meningkatkan Pembangunan Pariwisata dan Budaya di Kota Bandung?”

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian yang dilakukan memiliki beberapa tujuan. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui kerjasama *Sister City* Bandung-Seoul.
- 2) Untuk mengetahui program kerjasama *Sister City* Bandung-Seoul dalam bidang Pariwisata dan Budaya.
- 3) Untuk mengetahui implementasi dari program kerjasama *Sister City* Bandung-Seoul dalam mewujudkan pembangunan pariwisata dan budaya di kota Bandung.

1.5.1 Kegunaan Penelitian

Pada bagian ini akan menjelaskan mengenai penelitian yang diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- 1) Sebagai salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sidang Sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pasundan Bandung serta untuk mendapatkan gelar “Sarjana Ilmu Politik (S.IP)”.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun aplikatif bagi masyarakat dan akademisi pada umumnya serta bagi penulis pada khususnya.
- 3) Secara khusus diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi pihak-pihak dalam mempelajari bagaimana kerjasama sister city dapat terjalin.